



Buletin Parlementaria



3 Anggaran
Negara Harus
Dikelola
Akuntabel



4 DPR Sahkan
RUU KSDAHE
Jadi UU



Kolaborasi
Ciptakan
Pertumbuhan
Inklusif di DIY



Pemerataan
Kesejahteraan
Daerah
Terpencil

Nomor 1303/V/VII/2024 Juli 2024



9 772614 339005



Dukung Hilirisasi, Pembangunan Smelter Zinc Dipercepat



Dukung Hilirisasi, Pembangunan Smelter Zinc Dipercepat

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau langsung persoalan pembangunan smelter zinc (seng) milik PT Kapuas Prima Coal (KPC). Ketua Tim, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin, menilai KPC merupakan industri pionir yang merupakan pabrik smelter seng pertama di Indonesia, yang kini proses pembangunan pabriknya sudah mencapai kurang lebih 93 persen

“Alhamdulillah, smelter timbal (Pb) sudah produksi 100

persen, sementara smelter zinc sudah beroperasi 93 persen, sedang berproses. Ini merupakan industri pionir yang tentu kita dukung pengembangannya,” ujar Mukhtarudin usai peninjauan produksi barang mineral di PT KPC, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Kamis (7/7).

Ia mengatakan akan mendorong smelter ini dapat masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN), supaya mendapatkan insentif demi percepatan hilirisasi. “Karena hilirisasi ini merupakan sesuatu

yang memberikan nilai tambah yang besar, baik pendapatan negara maupun lapangan pekerjaan. Selain itu juga sebuah keniscayaan karena amanat dari UU Minerba,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap seluruh *stakeholder* terkait mendukung agar smelter paling lambat akhir 2024 dapat rampung. Sehingga, ditargetkan pada 2025, dapat berproduksi 100 persen. Diketahui, dalam paparan KPC kepada Komisi VII dan mitra terkait, ditemukan kendala bahwa belum optimalnya pembangunan smelter zinc tersebut dikarenakan masih terkendalanya lahan yang digunakan.

Adapun lahan yang bisa diperluas untuk digunakan pembangunan smelter tersebut masih berstatus sebagai lahan perhutanan. Karena itu, untuk pemberdayaan lahan tersebut menjadi smelter zinc, harus mendapatkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat. Hal itu sebagaimana amanat dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. — **rdn**



Ketua Tim, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin bersama tim meninjau KPC, Kamis (7/7/2024). Foto: Ridwan/Agung



Anggaran Negara Harus Dikelola Akuntabel



FOTO: ISTIHAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia pun mengapresiasi LHP LKPP di mana untuk APBN 2023, Pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan BPK tersebut disampaikan oleh BPK RI dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (8/7). Acara ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Adapun LHP dan LKPP untuk tahun 2023 disampaikan langsung oleh Ketua BPK RI Isma Yatun.

Sejalan dengan pesan dari Presiden Jokowi, Puan menilai predikat WTP merupakan kewajiban bagi semua lembaga. "Predikat WTP harus membawa kementerian/lembaga untuk bisa meningkatkan kinerja dengan semakin lebih baik lagi dalam memberi pelayanan ke rakyat," kata Puan.

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), fungsi dan kewajiban DPR yakni penyusunan legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap Pemerintah. Salah satunya adalah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. **rdn**



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindyia, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.S

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saurn, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Iwan, S.I.Kom.,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firista Dysie, Balgags Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompol, Zutfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budlati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfidhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Khrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapny





FOTO: RUMAH

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono terkait pembahasan RUU KSDAHE dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

DPR Sahkan RUU KSDAHE Jadi UU

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) menjadi undang-undang. Pengesahan UU tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (9/7).

“Selanjutnya saya akan menanyakan kepada seluruh anggota DPR RI dan pimpinan-pimpinan

fraksi, apakah RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti yang telah disampaikan dalam laporan pimpinan Komisi IV dapat kita setujui menjadi undang-undang?” ucap Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar selaku Pimpinan Sidang kepada hadirin dan diikuti dengan seruan ‘setuju’ oleh para anggota dewan yang hadir.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio

Djiwandono selaku Ketua Panja membacakan laporan Komisi IV atas RUU KSDAHE. Dalam laporannya, Komisi IV bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI telah menyepakati bahwa konsep RUU adalah RUU perubahan dengan judul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Catatan penting yang diberikan kepada Pemerintah setelah RUU ini diundangkan adalah Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi terhadap UU ini, agar semua elemen bangsa memahami atau mengetahui isi dari UU ini. Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta agar peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam undang-undang ini dapat segera diterbitkan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

gal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Seluruh Fraksi Setujui 27 RUU Kabupaten/Kota Jadi RUU Usul DPR

Dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Nusantara II, Jakarta, Selasa (9/7) diungkapkan bahwa cakupan materi penyusunan ke-27 RUU tersebut memberi paradigma baru pelaksanaan desentralisasi asimetris dalam pengembangan daerah otonom. RUU ini juga memungkinkan untuk diberikan keleluasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengembangkan daerahnya, sesuai karakteristik, kapasitas, kemampuan, dan potensi masing-masing daerah, dalam bingkai NKRI.

Pada kesempatan ini Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memberikan kesempatan kepada setiap juru bicara fraksi menyampaikan pendapat fraksi secara tertulis dan diserahkan ke meja Pimpinan DPR RI. "Dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

masing-masing. Saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah 27 RUU tentang Kabupaten Kota sebagaimana yang telah disampaikan tadi dapat disetujui menjadi RUU usul DPR

RI?" tanyanya, para Anggota Dewan seketika menjawab "setuju."

Penyusunan RUU tersebut merupakan bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi di dalam RUU tersebut juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah.

Sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multikultural, multi-etnis, multi-ras, dan bahkan multi-lanskap, namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **ssb/aha**



PENYUSUNAN RUU TERSEBUT MERUPAKAN BENTUK PEMBAHARUAN DARI SISI DASAR HUKUM DAN CAKUPAN WILAYAH YANG SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI SAAT INI

Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



RUU Perubahan Ketiga UU Kepariwisataaan Jadi Usul Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 - 2024 pada Selasa (9/7) telah menyetujui Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang memimpin langsung Rapat Paripurna tersebut, menetapkan

RUU Kepariwisataaan menjadi RUU usul DPR setelah menerima pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi X tersebut.

"Saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah usul inisiatif Komisi X DPR RI tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Muhaimin diikuti

persetujuan seluruh peserta sidang, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Diketahui, Komisi X DPR RI saat ini tengah menyusun RUU tentang Kepariwisataaan. Adapun pengaturan substansi RUU tersebut didasarkan pada paradigma baru kepariwisataaan, yaitu dari pariwisata yang berbasis pada jumlah massa (*mass tourism*) ke pariwisata berkualitas yang berkelanjutan dan regeneratif (*quality tourism*).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menjelaskan perubahan mendasar terhadap substansi RUU tentang Kepariwisataaan mulai dari arah pengaturan. Hal itu dengan tujuan untuk menguatkan identitas bangsa, perekonomian, dan pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa, dimana pengenalannya dimulai dari pendidikan. — **bia/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 - 2024 pada Selasa (9/7/2024).

Mampu Jawab Permasalahan dan Kebutuhan Hukum Pemda



FOTO: MUNCHENHAN

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis saat membacakan Laporan Komisi II Terhadap Pembahasan 26 RUU Kabupaten/Kota di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pembentukan 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau, dan Sumatera dilakukan sejalan dengan amanat pasal 18 ayat 1 UUD 1945. Disampaikan bahwa setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, tidak digabung dalam satu undang-undang.

26 RUU Kabupaten/Kota ini diharapkan dapat memperbaiki

dan memperbaiki regulasi terkait pembentukan daerah. Sehingga, dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin

timbul akibat dasar hukum yang tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

“Dan diharapkan pula mampu menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Cornelis saat membacakan Laporan Komisi II Terhadap Pembahasan 26 RUU Kabupaten/Kota di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Dalam laporannya, sebelumnya Komisi II DPR RI telah melakukan pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas pada Kamis, 27 Juni 2024. Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh fraksi, Komite I DPD RI serta pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR RI.

gal/rdn



MAMPU MENJAWAB PERKEMBANGAN, PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKATNYA

Cornelis

Anggota Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 dalam rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Cucun mengungkapkan, berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Banggar bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, dan harus sudah selesai paling lambat pada bulan Juli.

“Berikut kami sampaikan pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025. Tema RKP pada Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan,” papar Cucun.

Dia pun mengungkapkan, sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025 dijabarkan dalam Prioritas Nasional, yang pertama, memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan arah kebijakan antara lain Penguatan Demokrasi dan Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarusutamaan HAM.

Prioritas Nasional lainnya disusul, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa; pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas; memperkuat pembangunan sumber daya



Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 dalam rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang

disabilitas; melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. **— sb/aha**

SASARAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM RKP TAHUN 2025 DIJABARKAN DALAM PRIORITAS NASIONAL

Cucun Ahmad Syamsurijal

Wakil Ketua Banggar DPR RI



Dorong Revisi UU BUMN Segera Dibahas



FOTO : KRESNO/HAN

Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 - 2024 pada Selasa (9/7/2024), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kontribusi yang terus meningkat tersebut,

Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah mendorong penyusunan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk segera dibahas di DPR RI.

Luluk menjelaskan, tanggung

jawab besar BUMN utamanya dalam menghadapi tantangan zaman yang berubah menjadi urgensi RUU BUMN untuk segera dibahas. Selain itu, kemampuan BUMN menghadapi transformasi internal juga menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, sehingga RUU BUMN menjadi sebuah kebutuhan.

“Kita juga memiliki kebutuhan agar BUMN kita mampu menghadapi tantangan zaman yang memang berubah dibandingkan dengan tahun 2023 ketika kita memiliki undang-undang tersebut,” kata Luluk saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 - 2024 pada Selasa (9/7), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Adapun, saat ini RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR pada tanggal 3 Oktober 2023 lalu. Namun, hingga saat ini pimpinan DPR belum menyerahkan RUU tersebut kepada pemerintah, sehingga Presiden belum menerbitkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan belum dapat dibahas lebih lanjut oleh DPR bersama pemerintah.

“Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami memohon agar pimpinan DPR sesegera mungkin memberi kesempatan kepada Komisi VI untuk bisa menuntaskan tanggung jawab konstitusional ini dan menyelesaikan RUU ini bersama dengan pemerintah dan bisa kita bahas dan kita sahkan pada periode kami sebelum berakhir tahun 2024,” harapnya. **bia/aha**



MENDORONG PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN UNTUK SEGERA DIBAHAS DI DPR RI.

Luluk Nur Hamidah

Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji Terbentuk



FOTO: FARHANHAN

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak anket penyelenggaraan ibadah haji di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senayan, Selasa (9/7/2024).

Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak anket penyelenggaraan ibadah haji. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar tersebut mendapatkan persetujuan oleh para Anggota DPR RI.

"Seperti nama-nama yang saya sampaikan dan sudah ditayangkan oleh sekretariat, ini saatnya kami menanyakan kepada sidang

dewan. Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus anket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?" ucap Cak Imin kepada seluruh peserta rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senayan, Selasa (9/7).

Kemudian, seluruh anggota yang hadir dalam rapat paripurna tersebut pun serentak menyatakan persetujuannya. "Setuju," sehingga Cak Imin mengetuk palu sebagai pertanda keputusan telah diambil karena disetujui.

Cak Imin menyebut 30 anggota DPR RI masuk dalam pansus haji ini. Mereka terdiri dari fraksi PDI Perjuangan sebanyak 7 orang, Fraksi PKB 3 orang, Fraksi Partai NasDem 3 orang, Fraksi Partai Gerindra 4 orang, Fraksi Partai Demokrat 3 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 2 orang, dan seorang dari Fraksi PPP.

Dari seluruh perwakilan fraksi DPR RI, kemudian ditambah 9 orang yang ditunjuk masuk dalam pansus haji sebagai juru bicara.

tn/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Rapat Paripurna DPR Setujui Hibah Alpalhankam

Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang diselenggarakan Selasa (9/7) menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dari dan ke luar negeri. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui penerimaan hibah Alpalhankam tersebut.

“Selanjutnya, saya menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah laporan Komisi I atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan

keamanan dari dan ke luar negeri, dapat disetujui?” tanya Cak Imin dalam rapat dijawab “Setuju,” oleh seluruh peserta rapat paripurna diiringi ketukan palu Cak Imin tanda persetujuan.

Sebelum mengambil keputusan Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyampaikan Laporan terhadap Hasil Pembahasan Persetujuan Penerimaan dan Pemberian Hibah Alpalhankam dari dan/ke Luar Negeri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat

memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Wamenhan dan Panglima TNI dan setelah mendengarkan pandangan dari Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI memutuskan untuk menyetujui Penerimaan dan Pemberian Hibah Alpalhankam dari dan/ke Luar Negeri sesuai surat Menteri Pertahanan Nomor B/2045/M/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan Nomor B/2471/M/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023,” tuturnya. — rnm/aha



FOTO: ARIEFHAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menerima laporan dari Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin terhadap Hasil Pembahasan Persetujuan Penerimaan dan Pemberian Hibah Alpalhankam dari dan/ke Luar Negeri dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senayan, Selasa (9/7/2024).

Maraknya **JUDI ONLINE** Pada Anak

TAHUKAH KAMU?

Banyak remaja Indonesia terjerumus ke dalam perilaku ini akibat akses yang mudah melalui internet dan ponsel pintar. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2023 oleh beberapa lembaga riset diperoleh fakta bahwa sekitar 15% remaja usia 15-18 tahun mengakui pernah terlibat dalam aktivitas judi online secara teratur.



SUDAH PULUHAN RIBU ANAK MELAKUKAN JUDI ONLINE

Sebelumnya pemerintah mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia sebanyak 80 ribu jiwa di bawah umur 10 tahun dan 440 ribu jiwa dari antara usia 10-20 tahun. Sementara untuk di usia dewasa sebanyak 520 ribu jiwa dari antara usia 21-30 tahun lalu 1,64 juta jiwa di antara usia 30-50 tahun dan 1,35 juta pemain adalah di atas usia 50 tahun.

LAKUKAN INI UNTUK MENCEGAH ANAK MELAKUKAN JUDI ONLINE



Pantau gawai anak dan aktivitas *online* dengan memang *parental software*



Memperbanyak waktu luang bersama anak



Orang tua dapat mengkonsultasikan ke layanan psikolog atau profesional terdekat



Jika menemukan situs atau aplikasi judi online, laporkan ke aduankonten.id



DASAR HUKUM:

Isi Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.



Dr. (H.C.) Puan Maharani
 Ketua DPR RI

Judi online yang dilakukan anak-anak dan remaja ini dapat memberikan dampak yang berpengaruh terhadap masa depannya termasuk dapat merusak mental mereka. Pendampingan trauma dan psikologis untuk korban judi online harus disediakan.

Sumber: Berbagai Sumber

Tegakkan Hukum Sektor Keuangan yang Bermasalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kondisi industri jasa keuangan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit, piutang pembayaran, asuransi dan dana pensiun. Sementara itu kredit perbankan tumbuh sebesar 13,09% secara *year on year* (yoy) per April 2024.

Adapun untuk penyaluran kreditnya per April 2024 mencapai Rp7.301 triliun. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P meminta OJK terus menjaga kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan dalam mendukung sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada sektor keuangan yang bermasalah, OJK harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabel dan transparan dalam menerapkan peraturan sesuai perundang-undangan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisiner OJK di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P dalam Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisiner OJK di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar

mengucapkan terimakasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang telah mendukung dan memberikan apresiasi penuh terhadap kinerja OJK saat ini.

“Terima kasih kepada Komisi XI DPR RI terhadap masukan dan pertanyaan pada kesempatan ini termasuk pada seluruh proses untuk penyempurnaan pada sistem pelaporan perencanaan dan juga *update* pada sektor jasa keuangan, isu-isu yang ada saat ini akan kami respon untuk program prioritas kami kedepannya,” terangnya. **tn/aha**



DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA SEKTOR KEUANGAN YANG BERMASALAH, OJK HARUS TETAP MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

Dolfie O.F.P.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kolaborasi Ciptakan Pertumbuhan Inklusif di DIY



FOTO: AARON/HAN

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XI di Kantor Pelayanan Pratama, Wates, Yogyakarta, Jumat (05/07/2024).

Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kantor Pajak Pelayanan Pratama, Wates, Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menyoroti berbagai kebijakan pemerintah pusat ke daerah serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dalam kunjungan ini ditemukan berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius, termasuk kemiskinan, lapangan kerja, akses pembiayaan yang sulit, dan peningkatan sumber daya manusia.

“Kunjungan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan nasional benar-benar dirasakan dan dipahami di tingkat daerah,

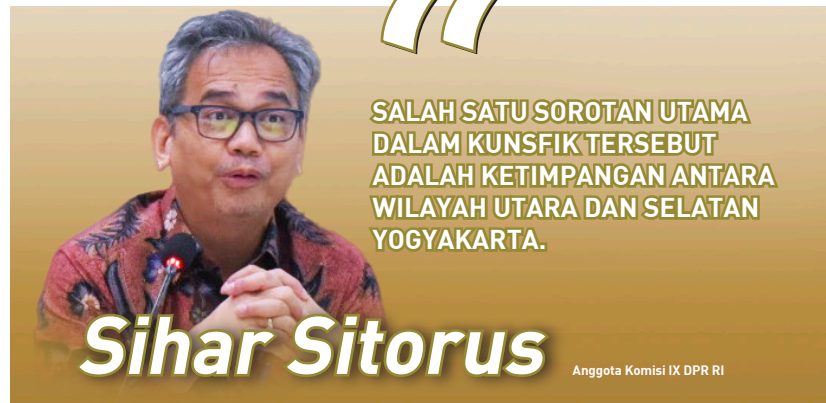
serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat terkait dengan kemiskinan, lapangan pekerjaan, dan akses pembiayaan,” pungkas Sihar usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Tim

Komisi XI di Kantor Pelayanan Pratama, Wates, Yogyakarta, Jumat (5/7).

Sihar menyebutkan bahwa salah satu sorotan utama dalam Kunsfik tersebut adalah ketimpangan antara wilayah Utara dan Selatan Yogyakarta. Wilayah Utara terlihat lebih maju dan modern, sedangkan wilayah Selatan memiliki potensi wisata yang kaya dan institusi pendidikan ternama dalam bidang kesenian. Ini menunjukkan perlunya upaya kolaboratif antara kedua wilayah untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

“Dengan kapital intelektual yang tinggi di Yogyakarta, terutama dari perguruan tinggi dan profesional lokal, kami yakin dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengangkat potensi daerah ini terlebih kita tahu bahwa wilayah selatan ini memiliki potensi wisata yang kaya dan diharapkan adanya kolaborasi antara kedua wilayah untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. 🗨️

aar/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



RUU Wantimpres Dibawa ke Paripurna, Jadi RUU Inisiatif DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk melakukan penyusunan revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres). Dalam Rapat pengambilan Keputusan tersebut, ada sembilan fraksi partai politik yang menyetujui untuk membawa

RUU Wantimpres ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Untuk itu, saya minta persetujuan kepada Bapak/Ibu sekalian, apakah draf ini bisa kita teruskan untuk dibahas di tingkat selanjutnya, diproses?” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat dan diikuti dengan jawaban kompak setuju dari hadirin yang mengikuti rapat di Gedung

Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Sebelumnya, telah dilakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas mengenai penyusunan draf RUU Wantimpres. Dalam pembahasan tersebut terdapat usulan untuk perubahan nomenklatur nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

“Perubahan yang ada di sini itu hanya terkait dengan perubahan nomenklatur, yang tadinya itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA),” ujarnya.

Draf RUU ini selanjutnya akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna sebagai RUU inisiatif DPR, dan akan dikirim ke Pemerintah. Kemudian akan menunggu Pemerintah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) bersama Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk ditindaklanjuti kembali oleh DPR RI. ➡ gal/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat menerima pandangan mini dari berbagai fraksi terkait revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

FOTO: FARHAN/PHAN

Pemerataan Kesejahteraan Daerah Terpencil



FOTO: ARIEF/AN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema 'RUU Daerah Kepulauan, Upaya Memperhatikan Pembangunan Daerah Kepulauan' di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPID), Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

RUU Daerah Kepulauan akan memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera, tetapi juga mencapai pulau-pulau kecil dan terpencil. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengungkapkan secara khusus keberadaan UU Kepulauan akan mengatur kewenangan anggaran daerah kepulauan.

"Kuncinya di situ kesejahteraan rakyat yang turunannya kemudian yang diinginkan. Peraturan perundang-undangan yang ada hari

ini, belum memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggara pemerintahan di daerah kepulauan," papar Baidowi dalam diskusi Forum Legislasi di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPID), Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Adapun RUU Daerah Kepulauan ini sudah sekitar 20 tahun dibahas oleh DPR RI dan DPD RI, namun persoalannya kembali ke pemerintah. Meski Presiden sudah terbitkan Surat Presiden (Surpres), tapi dalam pembahasannya banyak kendala. Khususnya terkait

masalah kelautan. Ini pula yang membuat Menkopolhukam RI enggan melanjutkan RUU inisiatif DPD RI tersebut.

Di kesempatan yang sama Anggota Komisi V Emanuel Melkiades Laka Lena (Melki) menyampaikan ada tiga hal yang menjadi perhatian di Indonesia Timur, yaitu pengelolaan sumber daya alam (SDA), administrasi birokrasi dan pelayanan kesehatan. "Itu program prioritas yang bisa mempercepat kesejahteraan dan kemajuan daerah kepulauan. Khususnya di Indonesia Timur," ujarnya. **ssb/aha**



Layanan Bandara Juanda Didorong Semakin Prima

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong pelayanan fasilitas keprotokolan Bandara Internasional Juanda agar semakin prima. Ia menekankan, pelayanan prima tersebut tidak hanya penting untuk anggota DPR, tapi juga bagi masyarakat. Tujuannya adalah agar semua pengguna layanan bandara dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan yang optimal.

“Kita tadi sudah berdiskusi dengan seluruh pejabat-pejabat di Bandara Juanda, di sini diharapkan akan menjadi Bandara Internasional yang semakin prima dalam pelayanan, kemudian sarana prasarana juga semakin ditingkatkan. Tidak hanya untuk Anggota Dewan tapi juga terutama untuk masyarakat yang terbang melalui Bandara Juanda,” jelas Novita usai memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/7).

Di samping kesiapan sarana dan prasarana, Politisi Partai Gerindra itu turut mendorong Bandara



FOTO: TIARAHAN

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/7/2024).

Internasional Juanda untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia, prosedur keberangkatan yang tepat waktu, termasuk

ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan sebagai antisipasi terhadap kondisi darurat.

“Maka dari itu mari kita sokong Bandara Juanda untuk kedepan bisa lebih baik lagi pelayannya. Bisa menjadi Bandara Internasional yang menampung produk-produk UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap produk dalam negeri kita serta penerbangannya semakin tepat waktu. Kita sokong semuanya semoga semakin sukses, istimewa, dan luar biasa,” ungkap Novita. tra/aha



MENDORONG BANDARA INTERNASIONAL JUANDA UNTUK DAPAT MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA MANUSIA, PROSEDUR KEBERANGKATAN YANG TEPAT WAKTU, TERMASUK KETERSEDIAAN FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI ANTISIPASI TERHADAP KONDISI DARURAT.

Novita Wijayanti

Wakil Ketua BURT DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: RUNI/HAN

BKSAP DPR RI dipimpin Ketua BKSAP Fadli Zon bertukar cinderamata usai menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk ASEAN, di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

BKSAP Dukung Gagasan Parlemen ASEAN

Sebagai negara yang telah lama menjalin persahabatan di kawasan ASEAN, Indonesia dan Filipina sama-sama mempunyai satu proses yang cukup dinamis di dalam politik yang demokratis. Tak hanya itu, banyak sekali hubungan budaya, sejarah dan ekonomi dengan Filipina. Bahkan kedua negara saling mendukung di berbagai forum internasional.

Oleh karena itu, BKSAP DPR RI dipimpin Ketua BKSAP Fadli Zon saat menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk ASEAN, di Ruang Dubes, Gedung Nusantara

III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7) secara khusus membicarakan isu-isu sekitar masalah-masalah di ASEAN. Salah satunya, gagasan mengenai adanya Parlemen ASEAN sebagaimana disuarakan secara aktif oleh Dubes Filipina.

"Filipina termasuk yang cukup aktif menyuarakan perlunya Parlemen ASEAN atau Parlemen dari negara-negara ASEAN. Ini ide yang menarik yang perlu dipikirkan karena bukan seperti Parlemen Eropa, Parlemen ASEAN itu maksudnya adalah Parlemen yang sudah terpilih dengan mekanisme proses masing-masing dan mungkin sesuai komposisi mereka

juga dijadikan semacam komite di dalam Parlemen masing-masing untuk ke ASEAN," ujar Fadli.

Lebih lanjut, ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, kedua negara saat diskusi menaruh perhatian khusus terhadap nasib sesama negara ASEAN yaitu Myanmar yang sudah tahun ketiga tidak mengikuti ASEAN Summit. Maupun dari sisi Parlemen tidak menghadiri **ASEAN Inter-Parliament SMD** (AIPA SMD) oleh karena tengah dalam proses menuju demokrasi kembali dan tengah mengalami tantangan di mana junta militer berkuasa. **pun/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Gali Potensi Kerja Sama Indonesia-Afrika

Serangkaian dengan persiapan pelaksanaan **Indonesia-Africa Parliamentary Forum** (IAPF), pada Senin, (8/7) BKSAP DPR RI bersama KBRI Addis Ababa melaksanakan seminar internasional dan diskusi yang bertajuk “Africa in Today’s World: Where is Indonesia?”. Hadir sebagai *Keynote Speaker*, Ketua BKSAP Fadli Zon menyampaikan pandangan terkait potensi strategis Benua Afrika dan bagaimana

Indonesia dapat mengambil peran dalam meningkatkan hubungan tersebut.

Dalam pidatonya, Fadli menyampaikan bahwa Indonesia dan Afrika memiliki kedekatan historis sebagai bagian penting dari Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok. Fadli menambahkan saat ini perekonomian negara-negara Afrika tumbuh pesat menjadi kekuatan ekonomi yang layak diperhitungkan, serta memiliki

potensi di bidang sumber daya mineral dan memiliki populasi pemuda yang besar.

“Selama ini Indonesia hanya menjadi penonton di barisan belakang terkait dengan isu Afrika, kini sudah saatnya Indonesia mengambil peran strategis dan mempererat kerja sama dengan Benua Afrika guna menguatkan posisi geostrategis Indonesia di kawasan ini dan juga secara global”, tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, Fadli menambahkan bahwa diplomasi parlemen memegang peranan penting dalam penguatan hubungan Indonesia baik secara bilateral maupun regional dengan negara-negara Afrika. BKSAP juga telah memiliki Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 16 negara Afrika, serta telah melaksanakan kunjungan diplomasi ke sejumlah negara seperti Tanzania, Namibia, dan Zimbabwe. **pun/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua BKSAP Fadli Zon dalam seminar internasional dan diskusi yang bertajuk Africa in Today's World: Where is Indonesia. di Jakarta, Senin, (8/7/2024).

FOTO: ENO/HAN

Desak PBB Akui Penuh Keanggotaan Palestina

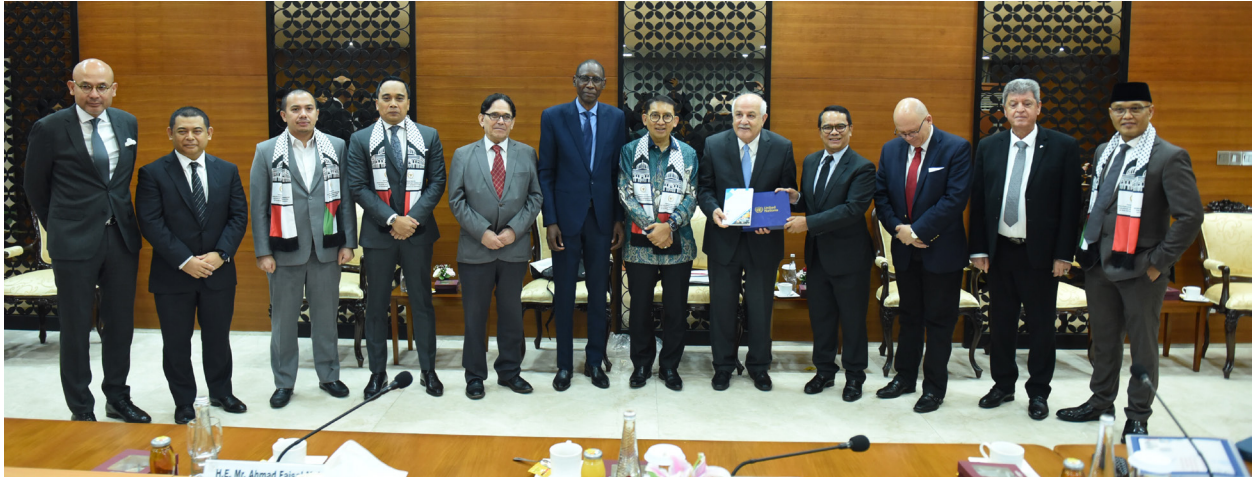


FOTO: JAKAWAN

BKSAP DPR RI saat menerima kunjungan kehormatan Komite PBB untuk Palestina di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI telah menerima kunjungan kehormatan Komite PBB untuk Palestina. Dalam Pertemuan ini, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan bahwa komite berharap DPR RI membantu meyakinkan negara-negara anggota PBB untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh majelis seluruh negara dunia itu.

Komite PBB untuk Palestina datang langsung dari New York, dipimpin oleh delegasi dari Senegal, Nikaragua dan Malaysia. “Mereka menyampaikan penghargaan terhadap Indonesia, yang selama ini mempunyai komitmen yang sangat tinggi memperjuangkan Palestina merdeka, dari mulai pemerintah, parlemen dan juga dari masyarakatnya,” ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Komite tersebut, katanya, juga sangat mengapresiasi Indonesia karena berpuluh tahun terus memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan. Adapun sejauh ini terdapat 149 negara yang mengakui keanggotaan penuh Palestina di PBB.

“Jadi, masih terus dilakukan upaya lobi. Dan termasuk diharapkan dari Parlemen Indonesia, untuk bicara ke beberapa parlemen agar negara yang belum mengakui Palestina, sebagai anggota penuh Dewan PBB,” sebut Fadli.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini optimistis Palestina memperoleh keanggotaan penuh. Sebab beberapa waktu belakangan, negara Amerika Latin, seperti Panama, dan beberapa negara lain di Eropa, seperti Norwegia, Spanyol, dan Irlandia sudah mendukung Palestina dan mengakuinya sebagai anggota penuh PBB. **aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Legislator Soroti PNBP Belum Optimal

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dipungkiri mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, sejauh ini salah satu sumber penerimaan tersebut dinilai masih belum optimal secara pemasukan kepada negara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Anis Byarwati melihat terdapat permasalahan berulang yang terjadi salah satunya yakni adanya keterlambatan atau PNBP yang belum disetor kepada kas negara.

“Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh BPK (bahwa) permasalahan yang berulang dari PNBP ini kenapa penerimaannya tidak optimal, itu ternyata memang ada beberapa. Tapi yang di-*highlight* oleh BPK ini, yang pertama PNBP yang terlambat atau belum disetor ke kas negara,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat BAKN dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).



FOTO: TAR/HAHAN

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Anis Byarwati dalam Rapat Dengar Pendapat BAKN dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Selain itu juga, terdapat PNBP yang kurang atau belum dipungut dan penggunaan langsung baik atas pungutan yang telat maupun yang belum memiliki dasar hukum. Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah lebih tegas dalam menerapkan regulasi agar tiap kementerian/ lembaga yang memiliki kewajiban berkontribusi terhadap PNBP tidak lagi mengalami keterlambatan setor kembali.

“Artinya yang wajib bayar itu mesti didorong untuk bayar. Kalau mau ambil gampang yang wajib bayar mesti didorong untuk segera bayar supaya bisa memenuhi pundi-pundi penerimaan negara,” tutur Politisi Fraksi PKS itu. [gal/rdn](#)



KITA MELIHAT DARI APA YANG DISAMPAIKAN OLEH BPK (BAHWA) PERMASALAHAN YANG BERULANG DARI PNBP INI KENAPA PENERIMAANNYA TIDAK OPTIMAL

Anis Byarwati

Wakil Ketua BAKN

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Regulasi dan Pengawasan PNBP Mesti Diperkuat



FOTO: RUMI/HAN

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya foto bersama usai pertemuan di Ruang Rapat BPK RI, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Dalam rangka melakukan penelaahan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan *focus group discussion* terhadap LHP BPK RI guna mengoptimalkan potensi PNBPs.

"PNBP ini adalah penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak kita, berharap bahwasanya PNBPs ini bisa akuntabel, transparan, dan lebih

menguntungkan bagi pemerintah Republik Indonesia kedepannya, kira-kira seperti itu," kata Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya usai pertemuan di Ruang Rapat BPK RI, Jakarta, Senin (1/7).

Polisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai skala prioritas saat ini yang mesti segera dilakukan ialah memperkuat dari sisi regulasi maupun pengawasan penerimaan maupun pemanfaatan PNBPs.

"Kita kan tahu negara kita kaya

raya kan, banyak batu bara, banyak emas, banyak semacam lah. Kita berusaha melihatnya bagaimana akhirnya ke depannya pengelolaan jadi lebih baik kira-kira seperti itu," kata Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini.

Meski demikian, Wahyu menerangkan pihaknya saat ini masih terus melakukan penelaahan-penelaahan dengan stakeholder terkait demi mengoptimalkan PNBPs.

we/aha



اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ

TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA:

Ir. Budhy Setiawan Bin Moh. Hatta

Anggota DPR RI

Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya.



Scan QR untuk berita selengkapnya



Tingkatkan Pemahaman Literasi dan Transformasi Informasi

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Perpustakaan DPR RI menggelar seminar bertajuk “Jelajah Dunia Literasi: Pemimpin Masa Depan Lembaga Informasi”. Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman literasi dan transformasi informasi.

Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini menyampaikan seminar ini berupaya menjelajahi peran perpustakaan dalam

menghadapi tantangan era digitalisasi. “Kita perlu melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya memahami transfer dan pengolahan informasi, tetapi juga mampu mengintegrasikan kebutuhan dan kegunaan informasi untuk pengembangan perpustakaan kita.” ujarnya kepada **Parlementaria** di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Rabu (10/7).

Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan

teknologi digital sebagai langkah menuju perpustakaan yang lebih dinamis dan relevan. Perpustakaan DPR RI, dengan koleksi-koleksi bersejarah, menjadi cerminan dari evolusi institusi ini. “Kami berharap koleksi-koleksi ini tidak hanya dinikmati oleh anggota DPR, tetapi juga oleh masyarakat umum,” lanjutnya.

Seminar ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk narasumber, pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Diskusi-diskusi yang digelar bertujuan untuk merumuskan strategi menghadapi masa depan perpustakaan sebagai pusat literasi dan pengetahuan yang tak tergantikan.

Perpustakaan DPR RI bersemangat untuk terus berinovasi dan bergerak maju dalam era informasi yang semakin kompleks. Hal ini dikarenakan perpustakaan ingin menjadi tonggak penting dalam pembentukan pemimpin masa depan yang cerdas dan terdidik.

— pdt/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini dalam acara seminar bertajuk Jelajah Dunia Literasi: Pemimpin Masa Depan Lembaga Informasi, yang diadakan oleh Bagian Perpustakaan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Rabu (10/7/2024).

FOTO : CANTIKAHAN

DOKUMENTER INVESTIGASI

TNR
PARLEMEN

AKSI DEWAN

ZAMRUD KATULISTIWA

"MENYEGERAKAN UNDANG-UNDANG KEPULAUAN"

MEIDI NUGROHO / EXECUTIVE PRODUCER |
ADRIANUS SEPTIANTO / PRODUCER | **HERIHERYADI** / LINE PRODUCER

SAKSIKAN HANYA DI

<http://tvrparlemen.dpr.go.id>

SCAN HERE

